

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian dan analisis mengenai sistem multi partai dan sistem presidensiil yang diterapkan di Indonesia pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan sistem multipartai dalam mewujudkan sistem presidensiil yang efektif, dapat diwujudkan dengan upaya-upaya yaitu :

Pertama, pengaturan sistem multi partai hendaknya tertulis secara pasti mengenai jumlah partai politik yang bisa mengikuti pemilu dengan komposisi maksimal 5-6 partai politik sehingga ada kompetisi antar partai-partai untuk lolos verifikasi, selain itu partai politik yang terpilih merupakan partai politik yang benar-benar kuat.

Kedua, syarat-syarat pendirian partai hendaknya diperketat dan dalam pengawasan yang ketat dan jangan samapi partai yang tidak lolos pemilu sebelumnya akan mengikuti lagi dengan hanya mengganti nama partai, selain itu *Electoral threshold* ditingkatkan (Parlemen <6% dinaikan >6%, dan presiden 20 %, dinaikan menjadi 30 %) sehingga nantinya presiden terpilih akan mendapatkan dukungan yang imbang di parlemen

Ketiga, apabila tetap akan menganut sistem multi partai hendaknya

multi partai mau tidak mau harus koalisi sehingga perlu ada mekanisme untuk mewujudkan koalisi yang permanent.

Keempat, presiden yang terpilih berasal dari partai politik yang mendapatkan dukungan mayoritas diparlemen sehingga pasangan calon presiden cukup memilih 2 (dua) pasang calon presiden yang memiliki dukungan mayoritas, paling tidak memiliki 40 % dukungan di parlemen sehingga pelaksanaan tugas presiden sebagai kepala Negara dan Kepala pemerintahan berjalan efektif.

## **B. SARAN**

Dalam rangka menciptakan pengaturan Sistem Multi Partai dalam mewujudkan sistem Presidensiil yang Efektif, maka ada saran-saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil analisa adalah sbb:

- Syarat pendirian partai terlalu longgar, sehingga perlu ada pengaturan yang lebih Akuntabel, guna menciptakan partai politik yang memang kuat dan bisa melaksanakan peran dan fungsinya untuk kepentingan Negara
- Lemahnya Mekanisme pengaturan sistem kepartaian yang dirapkan saat ini, yaitu sistem multi partai, karena tidak adanya mekanisme yang jelas mengenai pengaturan sistem multi partai. Dengan demikian perlu dibentuk pengaturan mengenai mekanisme pengelolaan partai-partai yang lebih dari

- Adanya koalisi yang tidak permanen dan kepentingan golongan/ partai politik yang masih dikedepankan daripada kepentingan bangsa, sehingga perlu adanya mekanisme koalisi yang jelas dan etika politik para elit politik hendaknya lebih daripada sehingga dapat mewujudkan kondisi politik